



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-Lk/ **625**
Sifat : Segera
Hal : Penilaian Kemampuan Keuangan

Jakarta, 5 Desember 2025

Yth. Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
di tempat

Sehubungan dengan penilaian kemampuan keuangan permohonan SBU, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 bahwa Pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar diperoleh dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Penilaian terhadap nilai aset merupakan total aset yang dimiliki BUJK pada neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 bahwa KAP wajib mencantumkan kode QR pada laporan auditor independen yang diterbitkan, sebagai hasil pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis.
4. Bahwa pendaftaran laporan auditor independen dan untuk memperoleh QR sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui Aplikasi Pelita yaitu aplikasi berbasis daring yang dapat diakses melalui alamat <https://pelita.kemenkeu.go.id/> digunakan untuk pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik.
5. Bahwa penilaian kemampuan keuangan KPBUJKA dapat dilakukan atas laporan keuangan *holding/group*.
6. Memperhatikan ketentuan penilaian kemampuan keuangan tersebut dan dalam rangka keseragaman penilaian kemampuan badan usaha maka LSBU agar:
 - a. Penilaian kemampuan keuangan BUJK Nasional dapat dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasi dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - 1) Kecukupan ekuitas dan total aset untuk seluruh permohonan SBU (yang masih berlaku atau sedang dalam proses permohonan) BUJK induk dan anak perusahaan.
 - 2) Laporan keuangan konsolidasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan menjelaskan daftar nama BUJK yang dalam kendali.

- b. Pemeriksaan kode QR pada laporan auditor independen dengan memastikan domain/link yang muncul adalah benar milik dari instansi penerbit yaitu Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Ir. Taufik Widjono, M.Sc

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi .
2. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
4. Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi.
5. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi.

Lampiran I

Nomor : BK 0401-Lk/ 825

Tanggal : 5 Desember 2025

Daftar Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

1. GAMANA KRIDA BHAKTI
2. LEMBAGA SERTIFIKASI INKINDO
3. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL
4. SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL
5. ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI
6. BINA MITRA RANCANGBANGUN
7. SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA
8. SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA
9. LSBU KONSTRUKSI INDONESIA
10. LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR
11. PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI
12. PT PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA
13. ASPIRASI ASPAL DAN BETON INDONESIA
14. PT. JASA SERTIFIKASI GAPKAINDO
15. PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI
16. PERKONINDO KONSULTAN KONSTRUKSI MANDIRI
17. PT. GAMANA NUSANTARA PERSADA
18. PT. KRIDA HANDAL JABAR
19. PT. GAMANA KRIDA BHAKTI JATIM
20. PT. HIMJASA SERTIFIKASI MANDIRI
21. PT. KARYA GEMILANG KEPRI
22. PT. LSBU PERPEKONI
23. PT. GLOBAL KONSTRUKSI SERTIFIKASI
24. PT. SBU KONSTRUKSI